

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
LEVERAGE, DAN UKURAN DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Anisa Farah Pratiwi
Nim : 31402300131

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
LEVERAGE, DAN UKURAN DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022
HALAMAN JUDUL**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Anisa Farah Pratiwi
Nim : 31402300131**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, *LEVERAGE*, DAN UKURAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022

Disusun Oleh :

Anisa Farah Pratiwi

NIM : 31402300131

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Usulan penelitian Skripsi
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 28 November 2024
Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 211402010

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
LEVERAGE, DAN UKURAN DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2020-2022**

Disusun Oleh :
Anisa Farah Pratiwi
NIM : 31402300131

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

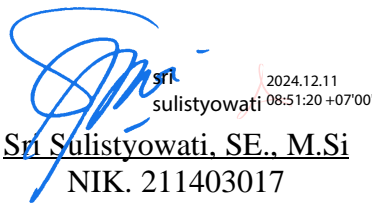


Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 211402010

Penguji,



Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE., M.Si., Akt
NIK 210403051



2024.12.11
sulistyowati 08:51:20 +0700'

Sri Sulistyowati, SE., M.Si
NIK. 211403017

Penelitian Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Farah Pratiwi
NIM : 31402300131
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh *Intergovernmental Revenue, Leverage*, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan,



Anisa Farah Pratiwi
NIM. 31402300131

ABSTRAK

Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *pengaruh intergovernmental revenue, leverage*, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 yang dijelaskan menggunakan teori *stewardship*. Variabel independen yang digunakan yaitu *intergovernmental revenue, leverage*, dan ukuran daerah. Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah *sampling jenuh*, sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2020-2022. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022. LKPD diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Program yang digunakan untuk menganalisis data adalah IBM SPSS Statistics 27. Hasil dari penelitian ini yaitu *intergovernmental revenue, leverage*, dan ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Intergovernmental Revenue, Leverage*, Ukuran Daerah, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effects of intergovernmental revenue, leverage, and regional size on the financial performance of local governments in regencies and cities in Central Java Province from 2020 to 2022, explained using stewardship theory. The independent variables used are intergovernmental revenue, leverage, and regional size. The dependent variable is the financial performance of local governments. The population for this study consists of local governments in regencies and cities in Central Java Province. The sampling technique used is saturation sampling, resulting in a sample of local governments from the regencies and cities that are part of Central Java Province during the period of 2020-2022. The data source for this research is secondary data derived from the Local Government Financial Reports (LKPD) of all regencies and cities in Central Java Province for the years 2020-2022. The LKPD was obtained from the website of the Audit Board of the Republic of Indonesia. The program used for data analysis is IBM SPSS Statistics 27. The results of this study indicate that intergovernmental revenue, leverage, and regional size does not have an influence on the financial performance of local governments.

Kata Kunci: Intergovernmental Revenue, Leverage, Regional Size, Financial Performance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue, Leverage*, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini juga merupakan sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan kompetensi yang telah penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, arahan, dan informasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE, MSi, Ak, CA, CSRS dan Ibu Sri Sulistyowati, SE, Msi selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan di masa yang akan datang.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang membangun bagi kebaikan penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman RPL S-1 Akuntansi 2023 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk rekan-rekan kerja pada Inspektorat Kota Semarang yang telah memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Jeno dan Wonbin yang selalu menginspirasi penulis agar bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dalam waktu, ilmu dan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis menantikan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anisa Farah Pratiwi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Anisa Farah Pratiwi
NIM. 31402300131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN	6
1.4 TUJUAN PENELITIAN	6
1.5 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 LANDASAN TEORI	9
2.1.1 Teori Stewardship	9

2.2	VARIABEL PENELITIAN.....	11
2.2.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.2.2	<i>Intergovernmental Revenue</i>	13
2.2.3	<i>Leverage</i>	17
2.2.4	Ukuran Daerah	19
2.3	PENELITIAN TERDAHULU.....	22
2.4	KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	27
2.4.1.	PENGEMBANGAN HIPOTESIS	27
2.4.2.	KERANGKA PENELITIAN.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	28
3.1.	JENIS PENELITIAN	28
3.2.	POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	28
3.2.1	Populasi Penelitian	28
3.2.2	Sampel Penelitian.....	29
3.2.3	Teknik Pengambilan Sampel	29
3.3.	SUMBER DAN JENIS DATA.....	29
3.4.	METODE PENGUMPULAN DATA.....	30
3.5.	DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR.....	30
3.5.1	Variabel Penelitian	30
3.5.2	Definisi Operasional dan Indikator Variabel	30

3.6. TEKNIK ANALISIS.....	32
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	32
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	33
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	35
3.6.4. Uji Hipotesis	36
3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	37
BAB IV	38
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	38
4.2. PENYAJIAN DATA.....	38
4.3. ANALISIS DATA	39
4.3.1. STATISTIK DEKRIPTIF.....	39
4.3.2. UJI ASUMSI KLASIK.....	42
4.4. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA.....	46
4.5. UJI HIPOTESIS (UJI STATISTIK T)	47
4.6. KOEFISIEN DETERMINASI (R^2).....	49
4.7. PEMBAHASAN	50
4.7.1 Pengaruh <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	50
4.7.2 Pengaruh <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	51

4.7.3 Pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	52
BAB V	52
PENUTUP	52
5.1. KESIMPULAN.....	52
5.2. KETERBATASAN.....	52
5.3. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi	31
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif	39
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	31
Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era baru pengelolaan pemerintahan daerah diawali dengan pengesahan UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, yang kemudian terjadi berbagai kali revisi. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagian telah dicabut menjadi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk implementasi otonomi daerah adalah desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Melalui kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif serta efisien, otonomi daerah memberikan peningkatan keterlibatan masyarakat pada pembangunan sekaligus memajukan keadilan dan pemerataan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan hal tersebut. Otonomi daerah diyakini penting untuk

memajukan pembangunan daerah berkelanjutan, mengembangkan layanan publik, dan memperkuat demokrasi. Konsep ini memberikan pemerintah daerah kekuasaan dan akuntabilitas untuk mengawasi masalah administratif mereka sendiri.

Keuangan daerah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah memberikan pengaruh yang kuat dan krusial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi keuangan yang kuat akan membuat daerah lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan suatu daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah dipersiapkan guna mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan dalam periode tertentu ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerahnya. Hal ini menunjukkan seberapa baik daerah tersebut dapat mengelola sumber daya keuangannya untuk mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini perlu dilakukan karena hasil pemeriksaan ini dapat mendukung sudut pandang tambahan untuk mengoptimalkan kualitas keuangan daerah. Tingkat kemandirian, rasio pertumbuhan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan beberapa indikator

yang dapat menunjukkan seberapa baik keuangan pemerintah daerah. Perhitungan analisis rasio berdasarkan laporan APBD sering digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan, diharuskan untuk mempublikasikan kinerja keuangannya sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan.

Pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang buruk dapat berdampak pada berbagai aspek, salah satunya aspek pelayanan publik. Standar layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan dukungan sosial terdampak oleh manajemen keuangan yang buruk. Salah satu kasus yang menggambarkan adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk yaitu pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah secara fluktuatif dari tahun 2010-2013, tetapi rasio ketergantungan keuangan daerah masih berada dalam kategori tinggi sampai sangat tinggi, serta rasio efisiensi pendapatan asli daerah tidak efisien (Sari dkk., 2021). Peningkatan dana perimbangan tanpa disertai kenaikan kinerja keuangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan eksternal dan belum dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara efektif. Contoh lain adalah rendahnya tingkat desentralisasi di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2018 (Setianingrum & Haryanto, 2020), yang menyoroti terbatasnya kesiapan pemerintah daerah untuk otonomi daerah dan mencerminkan keterlibatan pemerintah pusat yang signifikan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Anggraini dkk., 2019) ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen antara lain ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, rasio belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage. Faktor lainnya yaitu *intergovernmental revenue*, *capital expenditure*, *population*, dan *local tax revenue* (Lestari & Nurkhin, 2023).

Studi lainnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah diteliti oleh Adinata (2022) yang hasilnya menunjukkan bahwa leverage dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Penelitian oleh Manafe dkk., (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa dana perimbangan berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh (Siregar, 2020) menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota Propinsi Papua. Penelitian oleh Anggraini dkk., (2019) menunjukkan ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut pengaruh variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* digunakan sebagai pengembangan model penelitian. Teori *stewardship* terjadi dalam hal adanya hubungan antara dua pihak yang disebut sebagai prinsipal dan steward. Dari beberapa perbedaan yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis

tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami serta melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menerapkan landasan teori yang berbeda dan berfokus pada topik dan tahun yang berbeda. Subjek yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih karena kinerja keuangannya yang baik pada tahun 2014–2019 (Badriyah, 2021) dan tahun 2019-2022 (Berizky & Kurniawan, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berbasis pada fenomena dan research gap yang sudah diuraikan di latar belakang, ditemukan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai peran *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah dalam kaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, di satu sisi *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun di sisi lain variabel tersebut tidak mempengaruhi atau berpengaruh negatif. Dengan demikian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai peran

intergovernmental revenue, *leverage*, dan ukuran daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?”.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah. Dengan demikian, pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Untuk lebih memahami bagaimana *Intergovernment Revenue*, leverage, dan skala regional memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, menawarkan wawasan, dan bertindak sebagai referensi bagi semua pemangku kepentingan terkait.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan bahan masukan dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, serta ukuran tingginya akuntabilitas pemerintah daerah pada pengelolaan kinerja keuangannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship sebagaimana dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Gagasan ini menunjukkan keadaan manajemen didorong tujuan utama organisasi dan bukan ambisi pribadi. Dalam teori stewardship, terdapat dua pihak yaitu pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Dalam teori ini, tindakan yang diambil oleh manajer harus didasarkan pada kepentingan bersama. Saat kepentingan antara steward dan prinsipal berbeda, steward cenderung memilih bekerja sama daripada berkonfrontasi, karena mereka melihat kepentingan bersama dan tindakan yang sejalan dengan kehendak pemilik sebagai pilihan yang paling rasional (Raharjo, 2007).

Teori stewardship juga dapat diimplementasikan pada sektor publik. Hubungan antara pemerintah daerah sebagai steward dan pemerintah pusat serta masyarakat sebagai prinsipal merupakan salah satu aplikasi dari teori stewardship. Masyarakat merupakan pemilik sumber daya dan pemerintah daerah berperan sebagai pengelolanya. Konsep ini berlaku bagi organisasi sektor publik karena mereka bertanggung jawab kepada publik dan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap

kebijakan pemerintah selalu bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, termasuk di antaranya meningkatkan kinerja keuangan daerah (Safitri dkk., 2022).

Hubungan lainnya yaitu antara pemerintah daerah sebagai steward dan pemerintah pusat sebagai prinsipal, dalam manajemen dan alokasi sumber daya, pemerintah pusat selaku prinsipal tidak dapat bertindak sendiri. Pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya tersebut dikarenakan pemerintah pusat juga tidak dapat mengatur sumber daya secara eksklusif. Karena keterbatasan tersebut, penyusunan anggaran menjadi penting sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya.

Teori stewardship memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah harus mengelola *intergovernmental revenue* sebagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penggunaan dana dari pihak luar dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dialokasikan untuk proyek-proyek yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Teori stewardship menyoroti pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang harus diselaraskan dengan ukuran dan kompleksitas daerah yang dikelola.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Azhar (2008) kinerja adalah hasil yang dapat diukur dari suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu sebagai ukuran seberapa baik mereka melakukan tugas mereka. Kinerja ini bisa diukur melalui berbagai indikator yang relevan, seperti kualitas, kuantitas, dan efisiensi hasil yang dicapai pada periode waktu tertentu. Sementara itu, (Hamzah, 2007) memberikan definisi yang lebih fokus dalam tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh individu dan organisasi. Dalam konteks ini, kinerja bukan hanya mengacu pada aktivitas yang dilakukan, tetapi lebih pada hasil akhir yang diperoleh, yang mencerminkan seberapa baik tujuan yang telah disusun tercapai. Halim (2012) mengungkapkan bahwa "Kinerja keuangan daerah adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah". Definisi tersebut menekankan pentingnya penilaian dan pengukuran dalam mengetahui seberapa baik seseorang atau organisasi telah memenuhi tujuannya, yang pada gilirannya memengaruhi perencanaan strategis dan kemajuan di masa depan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang membantu memastikan bahwa suatu pemerintahan dapat menerapkan aturan keuangan dengan cara yang paling efektif dan optimal untuk menjaga kualitas layanan yang diharapkan. Kemampuan suatu daerah untuk menerapkan regulasi keuangan secara sukses dan efisien sangat bergantung pada kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan menciptakan kestabilan fiskal dan memadai untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa

manajemen keuangan yang efektif, daerah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, serta dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, evaluasi kinerja keuangan yang tinggi juga berperan penting dalam menarik investasi luar ke daerah tersebut (Saraswati & Rioni, 2019). Investasi dari luar daerah sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber daya dan anggaran dengan profesional dan transparan. Dengan demikian, melalui evaluasi yang cermat terhadap pengolahan keuangan daerah, menjadi kunci untuk membangun citra positif dan menarik lebih banyak modal eksternal yang dapat mendukung pembangunan daerah.

Mengukur keberhasilan lembaga atau organisasi merupakan langkah penting, baik untuk entitas nirlaba maupun entitas yang berorientasi laba. Bagi entitas nirlaba, pengukuran keberhasilan sering kali tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi lebih pada dampak sosial yang dapat tercapai, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau penyelesaian masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan lembaga nirlaba membutuhkan indikator kinerja yang lebih holistik dan berbasis pada hasil nyata yang dicapai untuk masyarakat. Sementara itu, bagi entitas yang berorientasi laba, keberhasilan biasanya diukur melalui parameter finansial seperti profitabilitas, efisiensi operasional, dan pertumbuhan pasar. Namun, meskipun berbeda dalam fokus dan pendekatannya, kedua jenis entitas ini memerlukan sistem pengukuran yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan mereka tercapai dan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran yang

tepat juga memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, memaksimalkan sumber daya yang ada, serta memperoleh tujuan jangka panjang yang sudah ditentukan. Melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, kemampuan pemerintah dalam mengelola pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dievaluasi, beserta seberapa baik pemerintah menjalankan perannya dalam proses tata kelola (Sesotyaningtyas, 2012).

Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah disusun dan dijalankan adalah cara yang umum untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Halim (2012) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode ke periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren yang muncul. Menurut Halim (2012), berdasarkan data keuangan dari APBD, ada beberapa rasio yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

- a) Rasio Kemandirian
- b) Rasio Efektivitas
- c) Rasio Efisiensi
- d) Rasio Aktivitas
- e) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*
- f) Rasio Pertumbuhan

2.2.2 Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue disebut juga sebagai dana perimbangan atau sekarang lebih dikenal sebagai transfer ke daerah (TKD). Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, transfer ke daerah yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. *Intergovernmental revenue* adalah hasil kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Pemberian *intergovernmental revenue* bertujuan untuk menurunkan disparitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di antara pemerintah daerah itu sendiri, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengeksplorasi potensi ekonomi lokal.

Intergovernmental revenue terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Dalam penelitian ini, *intergovernmental revenue* yang diteliti dibatasi hanya pada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, karena semua pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menerima semua dana ini.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang diberikan kepada daerah penghasil yang bertujuan mengurangi disparitas fiskal antara pemerintah dan daerah, dan juga kepada daerah non penghasil untuk mengatasi imbas negatif atau meluaskan pemerataan dalam

suatu daerah. Diharapkan dengan mengalokasikan DBH, daerah-daerah dengan sumber daya alam atau potensi ekonomi yang langka akan memperoleh lebih banyak uang untuk membantu inisiatif-inisiatif pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya membantu menutup kesenjangan antara daerah-daerah kaya dan miskin.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah agar mereka dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang lebih terbatas, dan menghindari ketidakmerataan dalam pembangunan antar daerah. Dengan kata lain, DAU berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap daerah, terlepas dari kondisi ekonominya, mempunyai keahlian yang cukup sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan secara keseluruhan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022, dana otonomi khusus tahun anggaran 2022 hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dana desa hanya diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten.

DAK ini dirancang dalam memberi dukungan pada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang spesifik, terutama pada sektor yang membutuhkan perhatian lebih seperti halnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Alokasi dana ini bukan saja memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun juga memastikan kebijakan dan program-program nasional dapat dijalankan secara lebih efektif di tingkat lokal. Dengan adanya DAK, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan proyek atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut (Elmi, 2002) dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan distribusi keuangan yang adil dan logis. Ini berarti bahwa daerah yang sumber daya alamnya melimpah dapat menerima porsi pendapatan yang lebih besar, sementara daerah lainnya akan lebih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti yang dijelaskan oleh Julitawati dkk. (2012).

2.2.3 *Leverage*

Dalam studi ini, rasio utang terhadap ekuitas pemerintah kabupaten dan kota berfungsi sebagai proksi leverage. Leverage merupakan statistik yang digunakan di sektor publik yang menunjukkan ketergantungan daerah dengan kreditornya dalam mendanai aset (Manafe dkk., 2023). Untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah, utang pemerintah daerah yang berasal dari kreditur diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan lain selain APBD.

Selain APBD, utang dari kreditor diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang membantu pemerintah daerah mengatasi kekurangan anggaran dan mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan adanya utang, pemerintah daerah dapat memperoleh dana tambahan yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek penting, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program sosial lainnya, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya didanai melalui anggaran yang tersedia. Namun, penggunaan utang tersebut dapat dikerjakan dengan hati-hati dan persiapan yang matang, supaya tidak menambah beban keuangan jangka panjang yang dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, penting untuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa utang yang diambil memiliki tujuan yang jelas, dengan kemampuan pembayaran yang terukur, serta dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Rasio *leverage* yang lebih tinggi pada pemerintah daerah mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan eksternal, yang pada gilirannya

dapat menyiratkan bahwa pemerintah daerah kesulitan untuk membiayai operasionalnya sendiri melalui sumber daya internal, seperti pendapatan asli daerah (PAD). Keputusan untuk pemberian kredit baik bagi kreditur maupun calon kreditur, biasanya menggunakan rasio *leverage* yang merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan.

Ketika sebuah daerah mempunyai rasio leverage yang besar, hal ini menunjukkan daerah tersebut lebih banyak memiliki ketergantungan pada utang atau pinjaman untuk membiayai kegiatan dan proyek-proyeknya. Keputusan untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dapat memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jangka pendek, hal ini juga menambah beban keuangan jangka panjang. Ketergantungan yang besar pada utang dapat meningkatkan risiko keuangan daerah, terutama jika pendapatan daerah tidak mampu menutupi kewajiban pembayaran utang. Selain itu, pembiayaan melalui utang yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat kemampuan daerah untuk membiayai program-program pembangunan lainnya, serta meningkatkan biaya bunga yang harus dibayar. Dengan demikian, penting untuk pemerintah daerah mempertimbangkan hati-hati penggunaan utang, dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan yang dihasilkan dan kewajiban utang yang harus dipenuhi, agar tidak membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.

Hal ini berpotensi memperburuk kinerja keuangan daerah, karena sebagian besar pendapatan daerah harus dialokasikan untuk membayar kewajiban utang, bukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik atau pembangunan infrastruktur. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan utang

dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan fiskal, terutama jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban utang tersebut. Oleh karena itu, rasio leverage yang tinggi sering dianggap sebagai indikator bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara efektif, yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih buruk. Rasio leverage biasanya merupakan salah satu pertimbangan terpenting bagi kreditor saat ini dan calon kreditor saat memberikan pinjaman.

2.2.4 Ukuran Daerah

Besar atau kecilnya variabel pemerintah daerah dapat diukur dengan aktiva total, jumlah karyawan, total penghasilan, dan tingkat produktivitas (Manafe dkk., 2023). Seluruh aset pemerintah daerah sering digunakan untuk mengukur ukuran daerah (Nugraheni & Adi, 2020). Ukuran daerah yang lebih besar sering kali diharapkan dapat memberi manfaat lebih tinggi untuk masyarakat, yakni melalui kemampuan untuk menyediakan layanan publik yang lebih efektif. Sebuah daerah yang mempunyai Jumlah aset yang lebih tinggi biasanya mempunyai kapasitas yang lebih tinggi dalam mengelola dan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh warganya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Aset-aset ini, baik berupa tanah, bangunan, maupun infrastruktur lainnya, diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam penelitian ini, ukuran daerah diproyeksikan dari jumlah total aset pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mengoptimalkan aktivitas operasional misalnya dapat memberikan pelayanan publik dan peluang

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan optimalnya operasional pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan efisien. Aset-aset yang diolah dengan baik mampu dijadikan sumber penghasilan tambahan melalui pemanfaatan atau penyewaan, yang pada saatnya mampu meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, pengelolaan aset yang optimal dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Di sisi lain, jika aset-aset tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi pemborosan atau ketidakefisienan yang justru merugikan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam analisis ini, total aset pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai ukuran relatif besar kecilnya suatu daerah, tetapi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Aset total adalah sumber daya finansial dan material yang dimiliki pemerintah daerah, seperti gedung publik, infrastruktur, dan sumber daya lain yang bisa dipergunakan dalam mendanai usaha bisnis dan menyediakan layanan masyarakat.

Semakin banyak sumber daya yang tersedia untuk mendanai proyek pembangunan dan meningkatkan standar layanan publik, semakin besar aset totalnya. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah, meminimalkan pemborosan, dan menciptakan potensi pendapatan tambahan melalui pemanfaatan aset-aset yang ada. Oleh karena itu, total aset bukan hanya indikator dari ukuran daerah, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Optimalisasi kegiatan operasional lebih besar, termasuk peningkatan layanan publik dan penciptaan peluang ekspansi ekonomi, dapat dicapai melalui pemerintahan daerah otonom dan berdaya. Dengan memberi wewenang luas kepada pemerintah daerah, mereka memiliki fleksibilitas dalam merancang serta melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah mereka. Hal ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi pada ketersediaan layanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal. Selain itu, dengan kekuasaan yang lebih besar, pemerintah daerah juga dapat menghasilkan iklim yang kondusif dalam investasi serta pengembangan ekonomi, baik melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah maupun dengan membuka peluang bagi pengusaha lokal dan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, otonomi daerah yang lebih besar tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memberi layanan masyarakat yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang ekspansi ekonomi yang dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Optimalisasi operasional pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan efektif.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Berbagai penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini akan diringkas dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Ahmad Mansur AM, Sufyan Amirullah, Hisyam Ichsan (2023)	Pengaruh Intergovernmental Revenue dan Value Added Human Capital terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: - Intergovernmental Revenue - Value Added Human Capital Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: - Uji Normalitas - Uji Heteroskedastisitas - Uji T (Parsial) - Uji Koefisien Determinasi (R ²)	- Intergovernmental revenue dan value added human capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah
2.	Henny A. Manafe, Simon Sia Niha, Dewa Putu S. Putra (2023)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	Variabel Independen: - Ukuran Pemerintah Daerah - Leverage - Dana Perimbangan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: - Kajian Pustaka	- Ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
3.	Irma Angriani Banunaek, Henny A.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan	Variabel Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Ukuran Pemerintah Daerah	- Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
	Manafe, M.E. Perseveranda (2022)	Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> - Leverage Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Pustaka 	berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
4.	Muhammad Husni Mubarok, Abdillah Arif Nasution, Sambas Ade Kesuma, Widyawati Pangestu (2022)	Local Government Financial Performance: The Effects of Capital Expenditure and Intergovernmental Revenue (The Case of South Sumatra Province, Indonesia)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Capital Expenditure - Intergovernmental Revenue Variabel Dependen: Financial Performance of Local Governments Metode Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - Multiple Regression Analysis - Descriptive Statistics Test - Normality Test - Coefficients Analysis 	<ul style="list-style-type: none"> - The capital expenditure variable has a positive and significant effect on the financial performance of local governments - The intergovernmental revenue has a negative and significant effect on local government financial performance
5.	Meidy Patricia Adinata (2022)	Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Leverage - Ukuran - Dana Perimbangan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Autokorelasi - Uji Multikolinearitas - Uji Heteroskedastisitas - Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Leverage dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur - Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - Uji Koefisien Determinasi (R²) - Uji F (Uji Kelayakan Model) - Uji Hipotesis (Uji T) 	daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur
6.	Alifiana Nur Majid Setyaningrum (2022)	Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Daerah (<i>Size</i>) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Intergovernmental Revenue</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Daerah (<i>Size</i>) Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Multikolinearitas - Uji Heteroskedastisitas - Analisis Regresi Linier Berganda - Uji Koefisien Determinasi (R²) - Uji Hipotesis (Uji T) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intergovernmental revenue</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Ukuran daerah (<i>size</i>) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Rahayu Lestari, Ahmad Nurkhin (2021)	Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Government Size - Intergovernmental Revenue - Capital Expenditure - Population - Local Tax Revenue Variabel Dependen: Local Government Financial Performance Metode Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - F-Test 	<ul style="list-style-type: none"> - Government size has a significant positive effect on the local government's financial performance - Intergovernmental revenue has a significant negative effect on the local government's financial performance - Capital expenditure has a

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - Multiple Regression Analysis - Coefficient Determination Test (R²) - T-test 	<ul style="list-style-type: none"> significant positive effect on the local government's financial performance - Population has a significant negative effects on the local government's financial performance - Local tax revenue has a significant positive effects on the local government's financial performance
8.	Eviniar Nugraheni, Priyo Hari Adi (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Ketergantungan pada Pusat - Tingkat Kekayaan Daerah (Wealth) - Belanja Modal - Ukuran Pemerintah (Size) - Temuan Audit - Leverage - Ukuran Legislatif - Pendapatan Pajak Daerah <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi Meta-Analisis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kekayaan daerah (wealth), ukuran pemerintah daerah (size), leverage, dan pendapatan pajak daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif tidak berhubungan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
9.	Mercy Irene Christine Siregar (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua	Variabel Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Ukuran Daerah - Leverage - Dana Perimbangan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode Analisis: - Analisis Statistik Deskriptif - Uji Heteroskedastisitas - Uji Normalitas - Uji Multikolinieritas - Uji F - Uji Koefisien Determinasi (R ²) - Uji t	- Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Propinsi Papua - Ukuran daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Propinsi Papua - Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Propinsi Papua - Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Propinsi Papua
10.	Lia Anggraini, Sri Rahayu, Junaidi (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)	Variabel Independen: - Ukuran Pemerintah Daerah - Tingkat Kekayaan Daerah - Tingkat Ketergantungan pada Pusat - Rasio Belanja Modal - Ukuran Legislatif - Leverage Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	- Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda - Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda - Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja Pemda - Rasio belanja modal tidak

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
			Metode Analisis: - Analisis Statistik Deskriptif - Analisis Regresi Data Panel	berpengaruh terhadap kinerja Pemda - Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda - Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda

2.4 KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1.1. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan biasanya lebih dikenal sebagai dana perimbangan atau transfer ke daerah (Ayuningsih, 2016). *Intergovernmental Revenue* yang signifikan menyediakan sumber daya yang cukup untuk pemerintah daerah untuk menjamin operasional yang efisien dan mendorong kinerja keuangan baik. Sebaliknya jika *intergovernmental revenue* yang diterima rendah, pemerintah daerah berisiko mengalami kekurangan dana untuk operasional mereka sehingga berdampak pada kinerja yang kurang optimal.

Dalam melakukan peningkatan analisis pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan dana antar pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga menjamin bahwa sumber daya didistribusikan seefisien mungkin, memenuhi tujuan pembangunan daerah, dan memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Dana tersebut harus dikelola secara efisien dan transparan. Selain itu, pengelolaan dana yang tepat akan memastikan bahwa program-program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.

Uraian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2023) dan Maulina et al., (2021) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah: H₁: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.1.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio utang terhadap ekuitas dikenal sebagai leverage. Ketergantungan suatu entitas terhadap pihak luar meningkat seiring dengan meningkatnya leverage (Kusumawardani, 2012). Kinerja keuangan entitas biasanya memburuk seiring dengan meningkatnya tingkat utang.

Leverage dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan dana untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut *stewardship theory*, untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen harus mengelola sumber dayanya secara efektif. Oleh karena itu, *leverage* dapat menjadi instrumen yang berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan, asalkan digunakan dengan bijaksana dan dalam batas yang wajar. *Leverage* yang mengacu pada penggunaan utang untuk mendanai proyek atau kegiatan pembangunan, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses dana tambahan di luar anggaran yang tersedia. Dengan dana tersebut, daerah dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas layanan publik, yang mungkin sulit dicapai hanya dengan mengandalkan pendapatan daerah. Namun, pemanfaatan *leverage* dilakukan dengan merencanakannya secara matang, agar tidak mengakibatkan risiko keuangan yang terlalu besar. Pengelolaan utang yang hati-hati dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah akan memastikan bahwa *leverage* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta memperbaiki kinerja keuangan daerah tanpa menambah beban keuangan yang tidak terkendali.

Uraian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Setyaningrum (2022) yang menjelaskan bahwa semakin besar *leverage* suatu pemerintah daerah maka kinerja keuangan suatu pemerintah daerah tersebut akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.1.3. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran utama program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang perlu didukung oleh kualitas aset yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang mencukupi. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah diharapkan akan meningkat seiring dengan ukuran daerah dan jumlah aset yang dimilikinya.

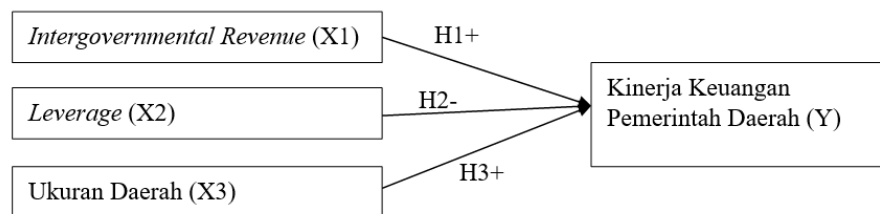
Teori stewardship memberikan dasar yang berguna untuk memahami bagaimana ukuran daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semua tingkat pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dengan berfokus pada dedikasi terhadap tujuan bersama, kepemimpinan yang melayani, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Adi (2020) dan Adinata (2022) yang membuktikan bahwa semakin tinggi ukuran daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan operasional serta memberi layanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃: Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka berpikir adalah gambaran yang menggabungkan interaksi antara berbagai variabel yang diambil dari berbagai teori. Dalam penelitian ini, dapat diilustrasikan bagaimana variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel independen yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *Intergovernmental Revenue* (X1), *Leverage* (X2), dan Ukuran Daerah (X3) serta variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka penelitian ini, model dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Siyoto & Sodik (2015), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi, mulai dari pengumpulan data, analisis data, serta menyimpulkan data, dan lebih jika kesimpulan dilengkapi dengan tabel, gambar, dan grafik. Penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data numerik yang dapat diukur dan dianalisis.

3.2. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek yang dianggap sebagai wilayah generalisasi. Penelitian ini melibatkan 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2020-2022, sehingga populasi yang digunakan berjumlah 105 (35 Kabupaten/Kota x 3 tahun).

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian besar dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2020-2022.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Dengan pengambilan sampel jenuh, setiap individu dalam populasi terwakili dalam sampel. Ketika populasinya kecil biasanya kurang dari 30 orang atau ketika tujuan penelitian adalah untuk melakukan generalisasi dengan tingkat ketidakakuratan yang paling rendah, pendekatan ini biasanya digunakan (Sugiyono, 2018).

3.3.SUMBER DAN JENIS DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dimiliki oleh pihak lain sebelumnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2022 setiap kabupaten dan kota menjadi sumber data utama penelitian ini. Baik situs web BPK maupun situs web resmi instansi pemerintah daerah menyediakan akses ke LKPD. Situs web Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan statistik lebih lanjut.

3.4.METODE PENGUMPULAN DATA

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, khususnya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh BPK-RI.

3.5.DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Penelitian

3.5.1.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.5.1.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang mempengaruhi/penyebab berubahnya variabel dependen/terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan Ukuran Daerah.

3.5.2 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

3.5.2.1. Variabel Dependen

Rasio efisiensi dipergunakan pada penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran yang membandingkan jumlah pengeluaran dengan jumlah uang yang dihasilkan salah satunya adalah rasio efisiensi (Aziz, 2016). Rumus berikut digunakan untuk menentukan rasio efisiensi.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Penerimaan}}$$

(Aziz, 2016)

Kriteria pengukuran rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi

Skala Interval Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (100%)	Kriteria
<60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
>100	Tidak Efisien

(Sari dkk., 2021b)

3.5.2.2. Variabel Independen

3.5.2.2.1. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah guna mendukung pembangunan serta mereduksi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. *Intergovernmental revenue* dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan} *}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Dasmar dkk., 2020)

*Dana Perimbangan = DBH + DAU + DAK

3.5.2.2.2. *Leverage*

Leverage adalah tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan Wijayanti & Suryandari (2020). Leverage dihitung sebagai Debt to Equity Ratio (DER).

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equities}}$$

(Wijayanti & Suryandari, 2020)

3.5.2.2.3. **Ukuran Daerah**

Ukuran daerah merupakan skala yang dapat diklasifikasikan sebagai besar atau kecil Wijayanti & Suryandari (2020). Ukuran daerah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Ukuran (Size)} = \text{Ln (Total Aset)}$$

(Wijayanti & Suryandari, 2020)

3.6. TEKNIK ANALISIS

3.6.1. **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini mencakup penghitungan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*deviation standard*), varian (*variance*), median, nilai minimum, nilai maksimum, rentang, dan lainnya (Ghozali, 2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah ialah variabel dependen penelitian, sedangkan *intergovernmental revenue*, leverage, dan ukuran daerah merupakan variabel independennya.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk memverifikasi bahwa data terdistribusi secara normal dan bebas dari masalah seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Jika model memenuhi kriteria BLUE (Terbaik, Linier, Tidak Bias, Penaksir), model tersebut dianggap sesuai untuk diestimasi.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi terdistribusi dengan normal. Jika data variabel independen dan dependen terdistribusi secara teratur, model regresi dianggap valid (Sunyoto, 2016). Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diterapkan dalam penentuan apakah datanya normal. Berikut ialah kriteria keputusan uji Kolmogorov-Smirnov.

1. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ maka data residual terdistribusi dengan normal.
2. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan $< 0,05$ maka data residual tidak terdistribusi dengan normal.

Untuk mengetahui bahwa data berdistribusi normal dengan grafik Normal Probability Plot memperhatikan ketentuan berikut.

1. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
2. Data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal.

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan/ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika residual memiliki varian yang sama maka disebut Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser. Data disebut bebas dari heteroskedastisitas apabila *probability* > 0,05 (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.6.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi disebut baik apabila bebas dari autokorelasi. Uji Run Test dilakukan untuk menguji apakah terdapat autokorelasi. Menurut (Ghozali, 2018) dasar untuk pengambilan keputusan uji Run Test berdasarkan kriteria berikut.

1. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) < 0,05 maka H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi gejala autokorelasi.
2. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) > 0,05 maka H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

3.6.2.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik

apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF) yang menggunakan alat bantu program SPSS. Model regresi dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 . Model regresi dikatakan terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance $< 0,1$ atau nilai VIF > 10 .

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sudiro, 2012) analisis regresi linear berganda adalah uji statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh intergovernmental revenue, leverage, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah

α = konstanta

β_1 = koefisien variabel intergovernmental revenue

β_2 = koefisien variabel leverage

β_3 = koefisien variabel ukuran daerah

X_1 = intergovernmental revenue

X_2 = leverage

X_3 = ukuran daerah

ε = koefisien error

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1. Uji Statistik t (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Landasan pengambilan keputusan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan hipotesis statistika

$H_0 : \beta_1 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , 10% dengan:

$$df_n = df_1 = k - 1$$

Keterangan:

df = degree of freedom

n = jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi

3. Menentukan pemeriksaan keputusan

a. Tingkat signifikansi $< 0,05$

H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Tingkat signifikansi $> 0,05$

H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang rendah (mendekati 0) menunjukkan pengaruh yang kecil dari variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten dan kota, yang memiliki 6 kota dan 29 kabupaten. Kabupaten serta kota tersebut terbagi lagi menjadi 7.810 desa, 753 kelurahan, dan 576 kecamatan.

4.2. PENYAJIAN DATA

Studi ini menganalisis variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan salah satu rasio keuangan. Selain itu, dianalisis juga variabel independen yaitu *intergovernmental revenue* (dana perimbangan/total pendapatan), *leverage (debt/equity)*, dan ukuran daerah (total aset).

Riset ini menggunakan sampel dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan secara jenuh dan didapat sampel sejumlah 89. Untuk rincian sampel yang diambil, dapat dilihat dalam

lampiran 1. Analisis data variabel pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 27.

4.3. ANALISIS DATA

4.3.1. STATISTIK DEKRIPTIF

Teknik yang berguna untuk meringkas data yang dikumpulkan dari sampel penelitian adalah analisis deskriptif. Semua variabel penelitian, *intergovernmental revenue*, *leverage*, ukuran daerah dan kinerja keuangan, menjadi sasaran perhitungan statistik deskriptif.

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

		Statistics			
		Intergovernmental Revenue	Leverage	Ukuran Daerah	Kinerja Keuangan
N	Valid	89	89	89	89
	Missing	0	0	0	0
Mean		,58416	,00872	29,04174	,88137
Median		,58500	,00797	28,98435	,84376
Std. Deviation		,031008	,004364	,264068	,108666
Minimum		,506	,001	28,505	,706
Maximum		,648	,020	29,529	1,103

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang tertera pada tabel 4.1, dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut:

1. Dari tabel 4.1 diketahui variabel *intergovernmental revenue* mencapai nilai tertinggi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 sebesar 0,648 dan nilai terendah di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar 0,506. Simpangan

baku sejumlah 0,031008 dan rata-rata sebesar 0,58416. Data tersebut tampak memiliki distribusi normal karena rata-rata lebih besar dari simpangan baku, yang menunjukkan bahwa terdapat sedikit variabilitas antara nilai terendah dan tertinggi. Dari nilai rata-rata, minimal, dan maksimal, dapat dilihat bahwa lebih dari setengah total pendapatan daerah merupakan *intergovernmental revenue*. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Variabel *leverage* mencapai nilai terbesar sebesar 0,020 yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, sedangkan Kota Magelang mencatat nilai terendah sebesar 0,001 pada tahun 2020. Dengan simpangan baku sebesar 0,004364, nilai rata-rata sebesar 0,00872. Distribusi data normal ditunjukkan oleh rata-rata yang melebihi simpangan baku. Hal ini menunjukkan sedikit variabilitas antara nilai minimum dan maksimum. Dari nilai rata-rata, minimal, dan maksimal, dapat dilihat bahwa nilai *leverage* dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sangat kecil. Hanya berkisar 0,001 sampai dengan 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hanya sedikit besarnya.
3. Variabel ukuran daerah Kota Jepara dengan nilai tertinggi sebesar 29,529 pada tahun 2021, sedangkan Kota Tegal mencatat nilai terendah pada tahun 2020, yaitu sebesar 28,505. Dengan simpangan baku sebesar 0,264068, nilai rata-ratanya adalah 29,04174. Data tersebut tampak memiliki distribusi normal karena rata-ratanya lebih besar dari simpangan baku, yang menunjukkan

bahwa terdapat sedikit variabilitas antara nilai minimum dan tertinggi. Dari nilai rata-rata, minimal, dan maksimal, dapat dilihat bahwa nilai ukuran daerah (aset daerah) dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu bervariasi. Nilai dari ukuran daerah berkisar antara 28,505 sampai dengan 29,529.

4. Variabel kinerja keuangan mencatat skor tertinggi sebesar 1,103 dimiliki oleh Kabupaten Kendal pada tahun 2022 yang menempatkannya dalam kategori kinerja yang tidak efisien. Kabupaten Klaten pada tahun 2020 memegang nilai terendah, yaitu 0,706, yang tergolong kinerja yang efisien. Dengan simpangan baku sebesar 0,108666, nilai rata-ratanya adalah 0,88137. Data tersebut tampaknya memiliki distribusi normal karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada simpangan baku, yang menunjukkan bahwa terdapat sedikit variabilitas antara nilai minimum dan tertinggi. Berdasarkan nilai rata-rata 0,88137, pemerintah daerah Jawa Tengah sering kali beroperasi dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hanya berada di klasifikasi cukup efisien. Tidak dapat dikatakan kinerja keuangan efisien dan tidak dapat juga dikatakan kinerja keuangan tidak efisien. Dalam hal ini pemerintah daerah kemungkinan menghadapi situasi dilema. Di satu sisi, saat pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang mendekati total penerimaannya, maka akan semakin tidak efisien kinerja keuangannya. Namun di sisi lain, saat pemerintah daerah terlalu menghemat pengeluarannya, terdapat kemungkinan dana

transfer dari pemerintah pusat akan dipangkas untuk tahun depan karena terdapat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang banyak.

4.3.2. UJI ASUMSI KLASIK

4.3.2.1. Uji Normalitas

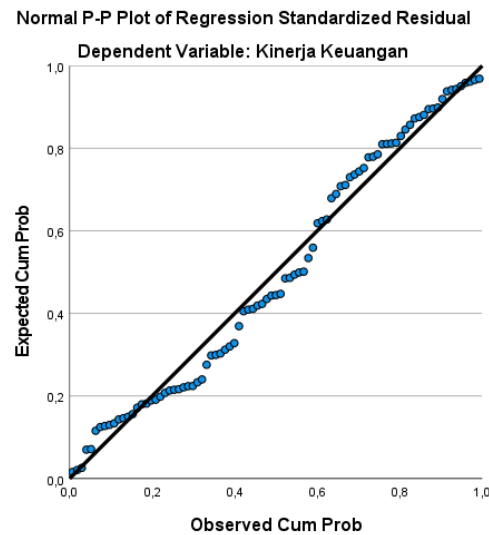
Karena banyak teknik statistik, termasuk regresi linier, didasarkan pada gagasan bahwa residual (kesalahan) model memiliki distribusi normal, kenormalan sangat penting untuk analisis regresi. Temuan analisis regresi bisa saja keliru atau tidak dapat dipercaya jika data tidak terdistribusi secara teratur. Metode Kolmogorov-Smirnov, yang memperbandingkan distribusi sampel normal, digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig) lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, sementara jika nilai tersebut kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	89
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	,074

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot



Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov* pada tabel 4.2, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,074. Nilai tersebut lebih dari 0,05 serta berdasarkan grafik probability plot, sebaran data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Dalam memastikan varians residual bervariasi di antara pengamatan, digunakan uji heteroskedastisitas. Homoskedastisitas adalah keadaan di mana variansnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana variansnya berfluktuasi. Salah satu anggapan mendasar dari model regresi linier ialah heteroskedastisitas tidak boleh ada. Pendekatan Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk mencari

kemungkinan tanda-tanda heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas tidak ada dalam data jika nilai signifikansi lebih tinggi 0,05 (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,797	0,808		0,986	0,327
	Intergovernmental Revenue	0,198	0,203	0,109	0,980	0,330
	Leverage	-0,388	1,553	-0,030	-0,250	0,803
	Ukuran Daerah	-0,029	0,026	-0,137	-1,093	0,277

a. Dependent Variable: ABS_RES5

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.3, nilai signifikansi untuk variabel *intergovernmental revenue* (X1), variabel *leverage* (X2), dan variabel ukuran daerah (X3) berturut-turut adalah 0,330, 0,803, dan 0,764. Tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada data karena setiap nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi disebut baik apabila bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode run test. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Total Cases	89
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,595

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Dari hasil *Runs Test*, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* uji autokorelasi adalah 0,595 yang berarti lebih tinggi 0,05. Dengan demikian, mampu dikatakan model penelitian tidak menunjukkan adanya indikasi autokorelasi.

4.3.2.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai Tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF). Model regresi dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 .

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Intergovernmental Revenue	0,910	1,099
	Leverage	0,777	1,287
	Ukuran Daerah	0,715	1,398

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel dalam masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

4.4. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Tujuan pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Regresi linear berganda dapat diketahui dari hasil uji berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,464	1,553		2,230	0,028
	Intergovernmental Revenue	0,511	0,380	0,146	1,345	0,182
	Leverage	-5,129	2,924	-0,206	-1,754	0,083
	Ukuran Daerah	-0,098	0,050	-0,237	-1,939	0,056

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.6, maka persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = 3,464 + 0,511X_1 - 5,129X_2 - 0,098X_3$$

Dari persamaan regresi yang telah disusun di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Konstanta persamaan regresi ialah 3,464 yang memperlihatkan apabila variabel independen bernilai nol ataupun dihilangkan, maka nilai kinerja keuangan sejumlah 3,464.
2. Koefisien regresi variabel *intergovernment revenue* adalah 0,511, yang berarti bahwa rasio efisiensi akan naik sebesar 0,511 untuk setiap kenaikan satu satuan *intergovernment revenue*.
3. Koefisien regresi variabel *leverage* adalah -5,129, yang berarti bahwa rasio efisiensi akan turun sebesar 5,129 untuk setiap kenaikan satu satuan *leverage*.
4. Koefisien regresi variabel ukuran daerah adalah -0,098, yang berarti bahwa rasio efisiensi akan turun sebesar 0,098 untuk setiap kenaikan satu satuan ukuran daerah.

4.5. UJI HIPOTESIS (UJI STATISTIK T)

Uji statistik t digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan dalam uji statistik t didasarkan pada nilai signifikansi t statistik. Apabila nilai signifikansi t statistik $< 0,05$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, dasar pengambilan keputusan pada uji statistik juga dapat dilihat pada nilai t hitung. Apabila t hitung $> t$ tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 89 ($n = 89$), $k = 3$, serta $\alpha = 5\%$. Sehingga, berdasarkan tabel distribusi nilai t tabel, nilai t tabel pada penelitian ini sebesar 1,98827.

Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel *intergovernmental revenue* (X_1) memiliki nilai signifikan 0,182 dan nilai t hitung 1,345. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak.
2. Variabel *leverage* (X_2) memiliki nilai signifikan 0,083 dan nilai t hitung -1,754. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak.
3. Variabel ukuran daerah (X_3) memiliki nilai signifikan 0,056 dan nilai t hitung -1,939. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

4.6. KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Menurut Ghozali (2011), Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati 0, semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,299 ^a	,089	,057	,105518
a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Intergovernmental Revenue, Leverage				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan				

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.7, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,057 atau sebesar 5,7%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 5,7% dan sisanya 94,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Pada Tabel 4.7 terlihat *Adjusted R Square* bernilai 0,057, atau 5,7%, menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah secara bersama-sama menyumbang 5,7% pengaruh terhadap kinerja keuangan. Faktor lain tidak dibahas pada analisis ini menyumbang 94,3% dari total variasi.

4.7. PEMBAHASAN

4.7.1 Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan hipotesis pertama (H_1) ditolak. Pemerintah daerah dengan ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki persentase yang cukup rendah. Rata-rata *intergovernmental revenue* adalah sebesar 0,58416, sedangkan mediannya adalah 0,58500.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2023) dan Maulina et al., (2021) yang membuktikan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Millenia, 2022) dan (Aprianto, 2021) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* di mana pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *steward*. Dengan adanya *intergovernmental revenue*, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kinerja keuangan yang efisien. Dalam penelitian ini, membuktikan bahwa, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum mengelola dana ini transfer dari pemerintah pusat secara optimal yang

digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, mencakup peningkatan efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.7.2 Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan hipotesis kedua (H₂) ditolak. Hal tersebut diakibatkan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang dijadikan bagian dari penelitian memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan modal sendiri.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Siregar (2020) dan Setyaningrum (2022) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nugraha, 2021) dan (Salsabilla & Rahayu, 2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori stewardship yang menekankan pada pengelolaan sumber daya bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Ketika *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya yang diperoleh dari pihak luar. Penerapan teori stewardship mengharuskan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dengan serius dampak jangka panjang *leverage*

dan menghindari pembiayaan utang yang berlebihan demi menjaga stabilitas fiskal dan kepentingan publik.

4.7.3 Pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni & Adi (2020) dan Adinata (2022) yang membuktikan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh (Santoso & Permata, 2023) dan (Millenia, 2022) menunjukkan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena kapasitas total aktiva dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum berjalan sesuai dengan fungsinya yang diharapkan (Putri & Amanah, 2020).

Temuan penelitian ini berlawanan dengan konsep *stewardship*, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sumber daya publik. Kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaannya secara efektif dan bertanggung jawab meningkat seiring dengan luas wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah besar aset yang kurang produktif untuk menghasilkan pendapatan daerah. Pengelolaan yang

efektif menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah aset. Untuk meningkatkan kinerja keuangannya, pemerintah daerah harus mengelola dan memaksimalkan aset tersebut agar dapat mengubahnya menjadi sumber pendapatan (Nugroho & Prasetyo, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut.

1. Variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
2. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
3. Variabel ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

5.2. KETERBATASAN

1. Pada penelitian ini, variabel independen (*intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah) hanya dapat menjelaskan variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) sebesar 5,7%. Artinya 94,3% variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terdapat pada penelitian ini.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini hanya dapat diterapkan pada kota dan kabupaten tertentu dalam sampel dan tidak dapat diekstrapolasi ke semua administrasi daerah di seluruh Indonesia.
3. Instrumen untuk mengukur variabel pada penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu, sehingga ada kemungkinan terdapat kelemahan dalam penerjemahannya yang dapat mengubah makna asli atau memungkinkan peneliti salah memahami maksud sebenarnya.

5.3. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain.

1. Bagi pemerintah daerah
Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah harus memanfaatkan *intergovernmental revenue* dan penggunaan aset secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kinerja keuangan. Untuk mengurangi kebutuhan mereka terhadap transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat berkonsentrasi pada peningkatan PAD sebagai sumber pemasukan utama mereka.
2. Bagi akademisi
 - a. Dengan memperluas populasi penelitian di luar pemerintah daerah Jawa Tengah dan mungkin mencakup daerah-daerah lainya penelitian di masa mendatang dapat memperluas fokus. Hasil penelitian akan lebih kuat jika

ukuran sampel ditingkatkan dan lebih banyak periode data terkini disertakan.

- b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah rasio pengukuran yang lain untuk kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan lainnya.
- c. Berdasarkan *adjusted R square* sebesar 5,7%, berarti masih terdapat variabel independen lain di luar penelitian ini yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(2).
- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)*. 45.
- Aprianto, I. (2021). The Effect Of Leverage, Legislative Measures, Intergovernmental Revenue And Regional Tax Revenue On Regency/City Government Financial In Indonesia. *IJAFIBS*, 9(3), 91–99.
- Ayuningsih, D. (2016). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*.
- Azhar, M. K. S. (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Universitas Sumatera Utara.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *EKSIS*, XI(1), 87–101.
<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Badriyah, S. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019*.
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(1), 246–259.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2, 39–57.
- Elmi, B. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika. (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2007). *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(2), 335–360.
<https://doi.org/10.25105/imar.v20i2.13968>
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3>
- Mansur, A. A., Amirullah, S., & Ichsan, H. (2023). The Effect of Intergovernmental Revenue and Value Added Human Capital on Regional Government Financial Performance. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(1), 1–11.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>

- Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local Government Financial Performance: The Effects of Capital Expenditure and Intergovernmental Revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Nugraha, A. (2021). Influence Of Financial Audit Findings, Governments Wealth, Size Of Government And Leverage On The Performance Of Regency/City Governments In Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 9(2), 58–66. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v9i2.13>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Jawa Timur (Influence of Characteristics of Government Areas Of Performance Finance Government Regional District & Municipality in Jawa Timur). *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.* (t.t.).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022.* (t.t.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.* (t.t.).
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573–1582. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1–20.

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, dan Perubahan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah (di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal EK&BI*, 5(2), 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). THE EFFECT OF WEALTH, LEVERAGE AND REGIONAL EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE (Case Study in Provincial Governments in Indonesia in 2019). *e-Proceeding of Management*, 8(6), 8479–8487.
- Santoso, Y., & Permata, I. (2023). The Role of Financial Signals in Regional Revenue and Expenditure Budgets Regional Government Performance. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen ...*, 1(3), 104–120.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 408–425.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Setyaningrum, A. N. M. (2022). *Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah (Size) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 26–42.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing. <https://www.researchgate.net/publication/314093441>
- Sudiro. (2012). *Modul 6 Metodologi Penelitian Bisnis*.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (t.t.).
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR SAMPEL

No	Nama Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang
3	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Kabupaten Boyolali
4	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Brebes
5	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	Kabupaten Cilacap
6	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Demak
7	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Kabupaten Jepara
8	Kabupaten Jepara	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Karanganyar
9	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Jepara	Kabupaten Kebumen
10	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Kendal
11	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Klaten
12	Kabupaten Klaten	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kudus
13	Kabupaten Kudus	Kabupaten Klaten	Kabupaten Magelang
14	Kabupaten Magelang	Kabupaten Kudus	Kabupaten Pati
15	Kabupaten Pati	Kabupaten Magelang	Kabupaten Pekalongan
16	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pati	Kabupaten Pemalang
17	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Purbalingga
18	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Purworejo
19	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Semarang
20	Kabupaten Semarang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Sragen
21	Kabupaten Sragen	Kabupaten Rembang	Kabupaten Sukoharjo
22	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Semarang	Kabupaten Tegal
23	Kabupaten Tegal	Kabupaten Sragen	Kabupaten Temanggung
24	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Wonosobo
25	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Tegal	Kota Magelang
26	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Temanggung	Kota Pekalongan
27	Kota Magelang	Kabupaten Wonogiri	Kota Salatiga
28	Kota Pekalongan	Kabupaten Wonosobo	Kota Tegal
29	Kota Salatiga	Kota Magelang	
30	Kota Tegal	Kota Pekalongan	
31		Kota Salatiga	

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Variabel Dependen (Kinerja Keuangan)

1. Data realisasi pengeluaran

No.	Kab/Kota	Realisasi Pengeluaran		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	2.030.532.397.495,00	2.042.019.297.374,00	2.039.210.930.404,00
2	Kabupaten Banyumas	2.686.475.021.852,00		
3	Kabupaten Batang		1.440.336.907.917,00	1.455.011.002.798,00
4	Kabupaten Blora	2.101.653.287.754,00	2.107.411.081.809,00	
5	Kabupaten Boyolali	1.972.664.326.304,00	1.887.765.660.348,00	2.094.174.043.489,00
6	Kabupaten Brebes	2.260.042.195.634,00	3.126.226.470.518,90	3.091.285.559.556,00
7	Kabupaten Cilacap	2.607.739.427.660,00	3.329.814.716.679,80	3.402.035.620.730,27
8	Kabupaten Demak	1.849.147.363.773,00	1.898.629.991.637,00	2.046.866.928.108,00
9	Kabupaten Grobogan		2.428.631.673.540,00	
10	Kabupaten Jepara	1.903.049.903.846,00	2.309.409.464.300,00	2.429.312.218.030,00
11	Kabupaten Karanganyar	1.750.519.736.124,00	1.799.595.275.289,00	1.846.792.220.976,00
12	Kabupaten Kebumen	2.138.579.092.380,00	2.779.840.698.100,00	2.191.867.028.425,00
13	Kabupaten Kendal	1.646.014.921.056,00	2.069.958.006.821,00	2.499.014.019.249,00
14	Kabupaten Klaten	1.820.342.899.284,00	1.820.638.422.785,00	1.873.841.539.069,28
15	Kabupaten Kudus	1.644.224.043.281,00	1.625.310.090.434,00	1.962.911.141.278,00
16	Kabupaten Magelang	2.304.375.917.161,00	1.771.575.214.425,00	2.570.326.001.677,00
17	Kabupaten Pati	2.053.158.413.693,00	1.955.956.398.112,00	1.997.374.330.022,00
18	Kabupaten Pekalongan	1.665.608.487.935,00	2.075.043.160.173,00	2.123.953.846.361,00
19	Kabupaten Pemasang	2.184.827.392.908,00	2.026.616.790.669,00	2.034.549.676.370,00
20	Kabupaten Purbalingga	1.500.418.873.732,00	1.606.578.193.840,39	1.714.438.611.980,00
21	Kabupaten Purworejo	1.598.638.305.094,00	2.135.478.213.580,00	2.347.131.165.050,00
22	Kabupaten Rembang		1.836.443.011.929,00	
23	Kabupaten Semarang	1.860.724.759.138,00	1.877.388.576.286,00	2.181.792.971.608,00
24	Kabupaten Sragen	1.784.669.428.617,00	2.160.877.775.669,00	1.954.064.181.992,00
25	Kabupaten Sukoharjo	1.727.809.331.309,00	1.756.972.447.254,00	1.696.793.753.977,00
26	Kabupaten Tegal	2.010.868.784.570,52	2.285.151.931.627,00	2.207.928.241.237,00
27	Kabupaten Temanggung	1.366.917.712.451,00	1.877.969.167.294,00	1.958.748.409.806,00
28	Kabupaten Wonogiri	1.902.671.657.801,00	1.930.600.661.653,00	
29	Kabupaten Wonosobo	1.536.908.827.915,00	1.526.634.690.220,00	1.674.857.583.547,00
30	Kota Magelang	798.353.191.714,00	935.047.734.177,00	1.039.501.502.733,00
31	Kota Pekalongan	944.840.460.675,56	962.091.792.004,00	1.031.090.188.444,02
32	Kota Salatiga	944.296.168.940,00	956.501.304.732,00	931.871.471.274,00
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	1.047.896.931.383,00		1.127.738.112.539,00

2. Data realisasi pendapatan

No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	1.994.604.106.561,00	2.086.059.742.250,00	2.044.546.403.305,00
2	Kabupaten Banyumas	3.330.186.788.242,00		
3	Kabupaten Batang		1.821.822.580.994,64	1.750.957.035.202,01
4	Kabupaten Blora	2.127.946.961.535,00	2.227.065.270.461,00	
5	Kabupaten Boyolali	2.382.403.220.150,00	2.430.235.208.977,95	2.372.372.551.015,00
6	Kabupaten Brebes	3.008.370.717.507,14	3.162.140.424.371,62	2.989.821.990.874,14
7	Kabupaten Cilacap	3.152.402.455.712,48	3.334.300.290.655,79	3.293.132.139.343,02
8	Kabupaten Demak	2.333.738.996.798,95	2.365.244.759.685,79	2.402.717.869.623,80
9	Kabupaten Grobogan		2.634.888.673.901,00	
10	Kabupaten Jepara	2.315.260.399.485,00	2.380.695.935.358,00	2.326.937.014.364,00
11	Kabupaten Karanganyar	2.121.386.179.225,00	2.165.983.748.571,95	2.251.540.154.854,05
12	Kabupaten Kebumen	2.763.229.307.229,80	2.832.035.015.733,00	2.847.196.017.404,00
13	Kabupaten Kendal	2.131.449.784.048,00	2.300.543.641.945,00	2.265.353.924.689,73
14	Kabupaten Klaten	2.578.135.836.354,00	2.570.037.777.373,00	2.587.693.432.935,00
15	Kabupaten Kudus	2.016.176.986.239,00	2.163.634.437.714,00	2.078.759.801.863,40
16	Kabupaten Magelang	2.380.457.680.604,00	2.469.754.315.099,00	2.558.024.177.090,00
17	Kabupaten Pati	2.662.375.437.006,00	2.725.202.350.660,00	2.705.053.757.861,00
18	Kabupaten Pekalongan	2.061.798.474.096,15	2.078.543.512.922,44	2.074.624.015.396,55
19	Kabupaten Pemasang	2.449.008.577.285,00	2.605.029.836.438,00	2.493.418.191.423,00
20	Kabupaten Purbalingga	1.952.749.301.274,00	2.054.843.644.547,39	2.022.884.629.933,00
21	Kabupaten Purworejo	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79
22	Kabupaten Rembang		1.911.328.505.019,46	
23	Kabupaten Semarang	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00
24	Kabupaten Sragen	2.212.824.974.529,00	2.336.721.727.716,00	2.177.840.072.042,00
25	Kabupaten Sukoharjo	2.040.394.761.328,00	2.119.633.370.538,00	2.014.818.262.391,00
26	Kabupaten Tegal	2.651.771.838.697,60	2.862.559.366.052,00	2.743.700.525.563,50
27	Kabupaten Temanggung	1.830.848.453.347,00	1.971.005.990.029,00	1.895.483.914.078,00
28	Kabupaten Wonogiri	2.273.678.538.635,00	2.303.564.898.937,00	
29	Kabupaten Wonosobo	1.878.995.666.418,00	1.967.781.049.592,00	1.921.189.093.169,00
30	Kota Magelang	946.188.761.537,00	994.366.987.776,00	985.763.798.066,00
31	Kota Pekalongan	953.155.394.614,95	966.372.557.051,02	989.013.074.926,00
32	Kota Salatiga	890.223.683.933,00	946.191.087.524,00	918.353.779.916,00
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	1.017.915.109.373,00		1.042.635.845.201,00

3. Hasil Perhitungan Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Rasio Efisiensi)

No.	Kab/Kota	Rasio Efisiensi		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	1,018	0,979	0,997
2	Kabupaten Banyumas	0,807		
3	Kabupaten Batang		0,791	0,831
4	Kabupaten Blora	0,988	0,946	
5	Kabupaten Boyolali	0,828	0,777	0,883
6	Kabupaten Brebes	0,751	0,989	1,034
7	Kabupaten Cilacap	0,827	0,999	1,033
8	Kabupaten Demak	0,792	0,803	0,852
9	Kabupaten Grobogan		0,922	
10	Kabupaten Jepara	0,822	0,970	1,044
11	Kabupaten Karanganyar	0,825	0,831	0,820
12	Kabupaten Kebumen	0,774	0,982	0,770
13	Kabupaten Kendal	0,772	0,900	1,103
14	Kabupaten Klaten	0,706	0,708	0,724
15	Kabupaten Kudus	0,816	0,751	0,944
16	Kabupaten Magelang	0,968	0,717	1,005
17	Kabupaten Pati	0,771	0,718	0,738
18	Kabupaten Pekalongan	0,808	0,998	1,024
19	Kabupaten Pemalang	0,892	0,778	0,816
20	Kabupaten Purbalingga	0,768	0,782	0,848
21	Kabupaten Purworejo	0,738	0,932	1,074
22	Kabupaten Rembang		0,961	
23	Kabupaten Semarang	0,841	0,777	0,933
24	Kabupaten Sragen	0,807	0,925	0,897
25	Kabupaten Sukoharjo	0,847	0,829	0,842
26	Kabupaten Tegal	0,758	0,798	0,805
27	Kabupaten Temanggung	0,747	0,953	1,033
28	Kabupaten Wonogiri	0,837	0,838	
29	Kabupaten Wonosobo	0,818	0,776	0,872
30	Kota Magelang	0,844	0,940	1,055
31	Kota Pekalongan	0,991	0,996	1,043
32	Kota Salatiga	1,061	1,011	1,015
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	1,029		1,082

LAMPIRAN 3

Data Penelitian Variabel *Intergovernmental Revenue* (X1)

1. Data Dana Perimbangan / Transfer ke Daerah

No.	Kab/Kota	Dana Perimbangan/Transfer ke Daerah		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	1.238.071.740.603,00	1.251.747.015.765,00	1.301.237.650.388,00
2	Kabupaten Banyumas	1.854.294.495.150,00		
3	Kabupaten Batang		1.068.002.486.995,00	1.096.299.986.931,00
4	Kabupaten Blora	1.259.239.750.269,00	1.406.481.782.693,00	
5	Kabupaten Boyolali	1.356.374.607.571,00	1.398.980.791.226,00	1.466.326.374.759,00
6	Kabupaten Brebes	1.708.279.450.821,00	1.722.570.229.031,00	1.850.513.017.766,00
7	Kabupaten Cilacap	1.757.591.202.654,00	1.787.763.401.074,00	1.954.167.356.400,00
8	Kabupaten Demak	1.181.046.800.246,00	1.230.848.488.721,00	1.315.198.929.174,00
9	Kabupaten Grobogan		1.508.851.762.438,00	
10	Kabupaten Jepara	1.280.105.479.190,00	1.362.972.121.042,00	1.397.581.193.934,00
11	Kabupaten Karanganyar	1.247.805.559.571,00	1.265.238.854.296,00	1.349.700.295.975,00
12	Kabupaten Kebumen	1.624.225.405.094,00	1.607.599.153.080,00	1.706.540.321.941,00
13	Kabupaten Kendal	1.228.541.096.335,00	1.293.961.426.712,00	1.363.739.923.259,00
14	Kabupaten Klaten	1.516.494.102.076,00	1.531.837.675.983,00	1.591.689.816.675,00
15	Kabupaten Kudus	1.183.590.147.772,00	1.239.890.567.326,00	1.314.958.509.502,00
16	Kabupaten Magelang	1.331.514.071.778,00	1.378.481.533.695,00	1.481.150.169.461,00
17	Kabupaten Pati	1.505.063.848.568,00	1.519.385.725.982,00	1.579.153.301.128,00
18	Kabupaten Pekalongan	1.206.915.407.953,00	1.208.036.399.361,00	1.261.416.347.693,00
19	Kabupaten Pemasang	1.478.357.232.531,00	1.549.611.665.251,00	1.616.650.571.638,00
20	Kabupaten Purbalingga	1.144.405.027.431,00	1.181.252.057.178,00	1.309.923.737.470,00
21	Kabupaten Purworejo	1.225.319.536.635,00	1.269.473.877.712,00	1.316.418.832.627,00
22	Kabupaten Rembang		1.031.432.921.909,00	
23	Kabupaten Semarang	1.240.480.579.637,00	1.264.272.822.840,00	1.388.666.921.036,00
24	Kabupaten Sragen	1.351.654.579.917,00	1.324.329.482.026,00	1.410.217.187.551,00
25	Kabupaten Sukoharjo	1.163.627.289.398,00	1.151.058.014.075,00	1.169.352.583.404,00
26	Kabupaten Tegal	1.477.714.812.445,00	1.533.598.637.942,00	1.625.199.145.190,00
27	Kabupaten Temanggung	1.046.567.778.773,00	1.120.897.599.379,00	1.200.469.313.335,00
28	Kabupaten Wonogiri	1.451.651.540.186,00	1.486.802.858.050,00	
29	Kabupaten Wonosobo	1.123.108.003.017,00	1.150.595.572.828,00	1.174.887.470.694,00
30	Kota Magelang	525.575.219.057,00	530.420.759.133,00	525.532.389.944,00
31	Kota Pekalongan	567.310.188.409,00	586.305.746.117,00	613.870.006.760,00
32	Kota Salatiga	522.042.585.441,00	534.246.583.063,00	548.480.698.284,00
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	623.096.507.712,00		620.139.282.290,00

2. Data realisasi pendapatan

No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	1.994.604.106.561,00	2.086.059.742.250,00	2.044.546.403.305,00
2	Kabupaten Banyumas	3.330.186.788.242,00		
3	Kabupaten Batang		1.821.822.580.994,64	1.750.957.035.202,01
4	Kabupaten Blora	2.127.946.961.535,00	2.227.065.270.461,00	
5	Kabupaten Boyolali	2.382.403.220.150,00	2.430.235.208.977,95	2.372.372.551.015,00
6	Kabupaten Brebes	3.008.370.717.507,14	3.162.140.424.371,62	2.989.821.990.874,14
7	Kabupaten Cilacap	3.152.402.455.712,48	3.334.300.290.655,79	3.293.132.139.343,02
8	Kabupaten Demak	2.333.738.996.798,95	2.365.244.759.685,79	2.402.717.869.623,80
9	Kabupaten Grobogan		2.634.888.673.901,00	
10	Kabupaten Jepara	2.315.260.399.485,00	2.380.695.935.358,00	2.326.937.014.364,00
11	Kabupaten Karanganyar	2.121.386.179.225,00	2.165.983.748.571,95	2.251.540.154.854,05
12	Kabupaten Kebumen	2.763.229.307.229,80	2.832.035.015.733,00	2.847.196.017.404,00
13	Kabupaten Kendal	2.131.449.784.048,00	2.300.543.641.945,00	2.265.353.924.689,73
14	Kabupaten Klaten	2.578.135.836.354,00	2.570.037.777.373,00	2.587.693.432.935,00
15	Kabupaten Kudus	2.016.176.986.239,00	2.163.634.437.714,00	2.078.759.801.863,40
16	Kabupaten Magelang	2.380.457.680.604,00	2.469.754.315.099,00	2.558.024.177.090,00
17	Kabupaten Pati	2.662.375.437.006,00	2.725.202.350.660,00	2.705.053.757.861,00
18	Kabupaten Pekalongan	2.061.798.474.096,15	2.078.543.512.922,44	2.074.624.015.396,55
19	Kabupaten Pemasang	2.449.008.577.285,00	2.605.029.836.438,00	2.493.418.191.423,00
20	Kabupaten Purbalingga	1.952.749.301.274,00	2.054.843.644.547,39	2.022.884.629.933,00
21	Kabupaten Purworejo	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79
22	Kabupaten Rembang		1.911.328.505.019,46	
23	Kabupaten Semarang	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00
24	Kabupaten Sragen	2.212.824.974.529,00	2.336.721.727.716,00	2.177.840.072.042,00
25	Kabupaten Sukoharjo	2.040.394.761.328,00	2.119.633.370.538,00	2.014.818.262.391,00
26	Kabupaten Tegal	2.651.771.838.697,60	2.862.559.366.052,00	2.743.700.525.563,50
27	Kabupaten Temanggung	1.830.848.453.347,00	1.971.005.990.029,00	1.895.483.914.078,00
28	Kabupaten Wonogiri	2.273.678.538.635,00	2.303.564.898.937,00	
29	Kabupaten Wonosobo	1.878.995.666.418,00	1.967.781.049.592,00	1.921.189.093.169,00
30	Kota Magelang	946.188.761.537,00	994.366.987.776,00	985.763.798.066,00
31	Kota Pekalongan	953.155.394.614,95	966.372.557.051,02	989.013.074.926,00
32	Kota Salatiga	890.223.683.933,00	946.191.087.524,00	918.353.779.916,00
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	1.017.915.109.373,00		1.042.635.845.201,00

3. Hasil Perhitungan Intergovernmental Revenue (X1)

No.	Kab/Kota	Intergovernmental Revenue		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	0,621	0,600	0,636
2	Kabupaten Banyumas	0,557		
3	Kabupaten Batang		0,586	0,626
4	Kabupaten Blora	0,592	0,632	
5	Kabupaten Boyolali	0,569	0,576	0,618
6	Kabupaten Brebes	0,568	0,545	0,619
7	Kabupaten Cilacap	0,558	0,536	0,593
8	Kabupaten Demak	0,506	0,520	0,547
9	Kabupaten Grobogan		0,573	
10	Kabupaten Jepara	0,553	0,573	0,601
11	Kabupaten Karanganyar	0,588	0,584	0,599
12	Kabupaten Kebumen	0,588	0,568	0,599
13	Kabupaten Kendal	0,576	0,562	0,602
14	Kabupaten Klaten	0,588	0,596	0,615
15	Kabupaten Kudus	0,587	0,573	0,633
16	Kabupaten Magelang	0,559	0,558	0,579
17	Kabupaten Pati	0,565	0,558	0,584
18	Kabupaten Pekalongan	0,585	0,581	0,608
19	Kabupaten Pemasang	0,604	0,595	0,648
20	Kabupaten Purbalingga	0,586	0,575	0,648
21	Kabupaten Purworejo	0,565	0,554	0,602
22	Kabupaten Rembang		0,540	
23	Kabupaten Semarang	0,561	0,523	0,594
24	Kabupaten Sragen	0,611	0,567	0,648
25	Kabupaten Sukoharjo	0,570	0,543	0,580
26	Kabupaten Tegal	0,557	0,536	0,592
27	Kabupaten Temanggung	0,572	0,569	0,633
28	Kabupaten Wonogiri	0,638	0,645	
29	Kabupaten Wonosobo	0,598	0,585	0,612
30	Kota Magelang	0,555	0,533	0,533
31	Kota Pekalongan	0,595	0,607	0,621
32	Kota Salatiga	0,586	0,565	0,597
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	0,612		0,595

LAMPIRAN 4

Data Penelitian Variabel *Leverage* (X2)

1. Data Total Utang

No.	Kab/Kota	Total Utang		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	21.558.235.704,63	24.306.773.816,40	32.956.897.032,61
2	Kabupaten Banyumas	53.745.484.966,00		
3	Kabupaten Batang		53.052.796.430,67	36.528.021.150,66
4	Kabupaten Blora	27.802.849.357,11	35.472.435.128,81	
5	Kabupaten Boyolali	31.048.552.796,16	29.497.830.796,50	27.477.869.962,96
6	Kabupaten Brebes	66.089.337.137,45	27.054.183.626,74	35.185.817.721,46
7	Kabupaten Cilacap	31.710.226.076,94	63.918.905.131,74	31.735.676.218,74
8	Kabupaten Demak	16.183.319.247,23	35.012.322.028,63	23.214.743.115,67
9	Kabupaten Grobogan		25.801.938.073,82	
10	Kabupaten Jepara	48.248.863.904,88	45.133.876.471,73	36.263.556.713,78
11	Kabupaten Karanganyar	59.694.366.841,81	69.520.026.740,53	27.950.667.239,07
12	Kabupaten Kebumen	41.790.047.964,00	63.997.463.892,83	36.584.708.422,94
13	Kabupaten Kendal	48.079.491.470,46	25.264.383.021,30	30.709.276.991,00
14	Kabupaten Klaten	20.876.092.289,00	8.335.992.845,00	11.570.216.778,00
15	Kabupaten Kudus	39.526.372.676,88	33.554.417.697,47	18.567.117.610,97
16	Kabupaten Magelang	21.102.659.627,22	37.025.724.121,75	21.169.133.931,27
17	Kabupaten Pati	17.505.067.742,00	40.904.701.137,00	23.258.401.718,00
18	Kabupaten Pekalongan	54.362.781.581,12	20.070.938.664,46	19.453.536.689,75
19	Kabupaten Pemasang	49.127.692.771,69	61.155.145.871,63	42.202.341.252,94
20	Kabupaten Purbalingga	40.848.285.164,38	37.443.869.103,96	29.187.047.669,79
21	Kabupaten Purworejo	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59
22	Kabupaten Rembang		30.243.474.358,86	
23	Kabupaten Semarang	39.346.280.871,65	72.861.576.581,90	31.772.297.300,29
24	Kabupaten Sragen	37.550.159.968,14	34.106.781.852,35	46.205.899.701,53
25	Kabupaten Sukoharjo	27.708.484.523,00	41.424.816.501,83	16.781.858.558,91
26	Kabupaten Tegal	37.522.234.509,00	42.853.499.527,00	38.174.333.684,34
27	Kabupaten Temanggung	46.722.714.827,41	67.494.782.277,80	40.207.166.704,76
28	Kabupaten Wonogiri	29.383.744.143,83	32.890.783.258,50	
29	Kabupaten Wonosobo	15.225.804.316,74	56.271.664.968,04	29.131.973.838,20
30	Kota Magelang	2.475.296.228,00	2.653.417.161,83	3.139.878.389,00
31	Kota Pekalongan	17.678.074.030,11	22.304.165.769,92	11.634.555.360,50
32	Kota Salatiga	35.120.126.433,38	31.685.527.286,81	21.394.042.439,32
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	44.143.784.410,00		31.379.978.794,20

2. Data Total Ekuitas

No.	Kab/Kota	Total Ekuitas		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	4.507.361.489.270,99	4.586.877.960.800,63	4.587.925.462.094,15
2	Kabupaten Banyumas	6.486.770.354.066,71		
3	Kabupaten Batang		2.982.009.354.128,95	3.051.687.415.146,11
4	Kabupaten Blora	3.355.098.974.795,45	3.500.738.615.519,97	
5	Kabupaten Boyolali	4.196.642.436.938,79	4.629.099.140.889,62	4.838.804.283.914,39
6	Kabupaten Brebes	3.674.672.097.574,43	3.811.424.435.564,48	4.068.034.952.451,00
7	Kabupaten Cilacap	6.015.556.894.602,80	6.281.159.392.042,40	6.599.306.539.286,21
8	Kabupaten Demak	5.680.937.398.810,17	5.879.630.371.527,45	5.850.384.378.051,30
9	Kabupaten Grobogan		4.107.411.095.604,82	
10	Kabupaten Jepara	6.578.629.184.619,62	6.629.294.536.543,16	6.454.661.240.821,02
11	Kabupaten Karanganyar	4.362.609.037.999,96	4.812.964.095.567,84	5.679.813.467.380,06
12	Kabupaten Kebumen	4.483.948.124.718,03	4.614.349.431.228,11	4.592.239.658.445,71
13	Kabupaten Kendal	3.082.700.128.174,38	3.601.726.645.074,06	3.358.537.077.057,56
14	Kabupaten Klaten	3.545.901.778.749,34	3.506.874.599.618,72	3.524.401.938.130,27
15	Kabupaten Kudus	4.630.969.928.737,96	4.816.622.662.300,41	4.987.889.516.811,16
16	Kabupaten Magelang	3.408.475.178.261,23	3.560.364.605.758,53	3.663.686.788.681,31
17	Kabupaten Pati	6.237.392.567.924,18	6.315.542.670.900,16	6.305.109.373.508,28
18	Kabupaten Pekalongan	3.011.702.120.201,71	3.120.626.708.224,06	3.192.757.689.941,44
19	Kabupaten Pemasang	3.753.873.858.568,38	3.828.522.513.996,71	3.789.884.540.124,53
20	Kabupaten Purbalingga	2.729.145.826.725,94	2.819.997.333.638,87	2.859.894.475.328,31
21	Kabupaten Purworejo	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08
22	Kabupaten Rembang		2.473.832.794.101,10	
23	Kabupaten Semarang	4.849.514.934.945,45	5.224.143.351.664,39	5.301.893.372.186,50
24	Kabupaten Sragen	4.050.027.405.267,93	4.189.487.219.492,99	4.200.140.669.173,72
25	Kabupaten Sukoharjo	5.647.261.503.416,30	6.256.904.261.564,90	6.467.696.379.921,05
26	Kabupaten Tegal	3.567.018.723.558,27	3.797.570.564.576,19	3.818.292.172.747,87
27	Kabupaten Temanggung	3.137.975.200.572,46	3.352.941.113.397,16	3.266.406.729.914,78
28	Kabupaten Wonogiri	3.791.685.551.049,84	3.879.057.760.993,31	
29	Kabupaten Wonosobo	3.426.116.381.797,62	3.705.604.900.888,13	3.841.146.863.658,42
30	Kota Magelang	4.157.787.314.289,39	4.334.740.145.348,85	4.264.366.048.392,79
31	Kota Pekalongan	2.904.239.377.358,02	3.026.637.671.310,73	3.262.751.688.319,74
32	Kota Salatiga	3.087.577.302.243,39	3.168.706.245.936,69	3.188.821.202.549,04
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	2.352.813.494.652,12		2.505.506.721.531,05

3. Data Leverage

No.	Kab/Kota	Leverage		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	0,005	0,005	0,007
2	Kabupaten Banyumas	0,008		
3	Kabupaten Batang		0,018	0,012
4	Kabupaten Blora	0,008	0,010	
5	Kabupaten Boyolali	0,007	0,006	0,006
6	Kabupaten Brebes	0,018	0,007	0,009
7	Kabupaten Cilacap	0,005	0,010	0,005
8	Kabupaten Demak	0,003	0,006	0,004
9	Kabupaten Grobogan		0,006	
10	Kabupaten Jepara	0,007	0,007	0,006
11	Kabupaten Karanganyar	0,014	0,014	0,005
12	Kabupaten Kebumen	0,009	0,014	0,008
13	Kabupaten Kendal	0,016	0,007	0,009
14	Kabupaten Klaten	0,006	0,002	0,003
15	Kabupaten Kudus	0,009	0,007	0,004
16	Kabupaten Magelang	0,006	0,010	0,006
17	Kabupaten Pati	0,003	0,006	0,004
18	Kabupaten Pekalongan	0,018	0,006	0,006
19	Kabupaten Pemalang	0,013	0,016	0,011
20	Kabupaten Purbalingga	0,015	0,013	0,010
21	Kabupaten Purworejo	0,010	0,012	0,013
22	Kabupaten Rembang		0,012	
23	Kabupaten Semarang	0,008	0,014	0,006
24	Kabupaten Sragen	0,009	0,008	0,011
25	Kabupaten Sukoharjo	0,005	0,007	0,003
26	Kabupaten Tegal	0,011	0,011	0,010
27	Kabupaten Temanggung	0,015	0,020	0,012
28	Kabupaten Wonogiri	0,008	0,008	
29	Kabupaten Wonosobo	0,004	0,015	0,008
30	Kota Magelang	0,001	0,001	0,001
31	Kota Pekalongan	0,006	0,007	0,004
32	Kota Salatiga	0,011	0,010	0,007
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	0,019		0,013

LAMPIRAN 5

Data Penelitian Variabel Ukuran Daerah (X3)

1. Data Total Aset

No.	Kab/Kota	Total Aset		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	4.528.919.724.975,62	4.611.184.734.617,03	4.620.882.359.126,76
2	Kabupaten Banyumas	6.540.515.839.032,71		
3	Kabupaten Batang		3.035.062.150.559,62	3.088.215.436.296,77
4	Kabupaten Blora	3.382.901.824.152,56	3.536.211.050.648,78	
5	Kabupaten Boyolali	4.227.690.989.734,95	4.658.596.971.686,12	4.866.282.153.877,35
6	Kabupaten Brebes	3.740.761.434.711,88	3.838.478.619.191,23	4.103.220.770.172,46
7	Kabupaten Cilacap	6.047.267.120.679,74	6.345.078.297.174,14	6.631.042.215.504,95
8	Kabupaten Demak	5.697.120.718.057,40	5.914.642.693.556,08	5.873.599.121.166,97
9	Kabupaten Grobogan		4.133.213.033.678,64	
10	Kabupaten Jepara	6.626.878.048.524,50	6.674.428.413.014,89	6.490.924.797.534,80
11	Kabupaten Karanganyar	4.422.303.404.841,81	4.882.484.122.308,37	5.707.764.134.619,13
12	Kabupaten Kebumen	4.525.738.172.682,03	4.678.346.895.120,94	4.628.824.366.868,65
13	Kabupaten Kendal	3.130.779.619.644,84	3.626.991.028.095,36	3.389.246.354.048,56
14	Kabupaten Klaten	3.566.777.871.038,34	3.515.210.592.463,72	3.535.972.154.908,27
15	Kabupaten Kudus	4.670.496.301.414,84	4.850.177.079.997,88	5.006.456.634.422,13
16	Kabupaten Magelang	3.429.577.837.888,45	3.597.390.329.880,28	3.684.855.922.612,58
17	Kabupaten Pati	6.254.897.635.666,18	6.356.447.372.037,16	6.328.367.775.226,28
18	Kabupaten Pekalongan	3.066.064.901.782,83	3.140.697.646.888,52	3.212.211.226.631,19
19	Kabupaten Pemasang	3.803.001.551.340,07	3.889.677.659.868,34	3.832.086.881.377,47
20	Kabupaten Purbalingga	2.769.994.111.890,32	2.857.441.202.742,83	2.889.081.522.998,10
21	Kabupaten Purworejo	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67
22	Kabupaten Rembang		2.504.076.268.459,96	
23	Kabupaten Semarang	4.888.861.215.817,10	5.297.004.928.246,29	5.333.665.669.486,79
24	Kabupaten Sragen	4.087.577.565.236,07	4.223.594.001.345,34	4.246.346.568.875,25
25	Kabupaten Sukoharjo	5.674.969.987.939,30	6.298.329.078.066,73	6.484.478.238.479,96
26	Kabupaten Tegal	3.604.540.958.067,27	3.840.424.064.103,19	3.856.466.506.432,21
27	Kabupaten Temanggung	3.184.697.915.399,87	3.420.435.895.674,96	3.306.613.896.619,54
28	Kabupaten Wonogiri	3.821.069.295.193,67	3.911.948.544.251,81	
29	Kabupaten Wonosobo	3.441.342.186.114,36	3.761.876.565.856,17	3.870.278.837.496,62
30	Kota Magelang	4.160.262.610.517,39	4.337.393.562.510,68	4.267.505.926.781,79
31	Kota Pekalongan	2.921.917.451.388,13	3.048.941.837.080,65	3.274.386.243.680,24
32	Kota Salatiga	3.122.697.428.676,77	3.200.391.773.223,50	3.210.215.244.988,36
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	2.396.957.279.062,12		2.536.886.700.325,25

2. Data Perhitungan LN Total Aset

No.	Kab/Kota	LN Total Aset		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Banjarnegara	29,142	29,160	29,162
2	Kabupaten Banyumas	29,509		
3	Kabupaten Batang		28,741	28,759
4	Kabupaten Blora	28,850	28,894	
5	Kabupaten Boyolali	29,073	29,170	29,213
6	Kabupaten Brebes	28,950	28,976	29,043
7	Kabupaten Cilacap	29,431	29,479	29,523
8	Kabupaten Demak	29,371	29,408	29,401
9	Kabupaten Grobogan		29,050	
10	Kabupaten Jepara	29,522	29,529	29,501
11	Kabupaten Karanganyar	29,118	29,217	29,373
12	Kabupaten Kebumen	29,141	29,174	29,163
13	Kabupaten Kendal	28,772	28,919	28,852
14	Kabupaten Klaten	28,903	28,888	28,894
15	Kabupaten Kudus	29,172	29,210	29,242
16	Kabupaten Magelang	28,863	28,911	28,935
17	Kabupaten Pati	29,464	29,480	29,476
18	Kabupaten Pekalongan	28,751	28,775	28,798
19	Kabupaten Pemasang	28,967	28,989	28,974
20	Kabupaten Purbalingga	28,650	28,681	28,692
21	Kabupaten Purworejo	28,765	28,826	28,871
22	Kabupaten Rembang		28,549	
23	Kabupaten Semarang	29,218	29,298	29,305
24	Kabupaten Sragen	29,039	29,072	29,077
25	Kabupaten Sukoharjo	29,367	29,471	29,500
26	Kabupaten Tegal	28,913	28,977	28,981
27	Kabupaten Temanggung	28,789	28,861	28,827
28	Kabupaten Wonogiri	28,972	28,995	
29	Kabupaten Wonosobo	28,867	28,956	28,984
30	Kota Magelang	29,057	29,098	29,082
31	Kota Pekalongan	28,703	28,746	28,817
32	Kota Salatiga	28,770	28,794	28,797
33	Kota Semarang			
34	Kota Surakarta			
35	Kota Tegal	28,505		28,562

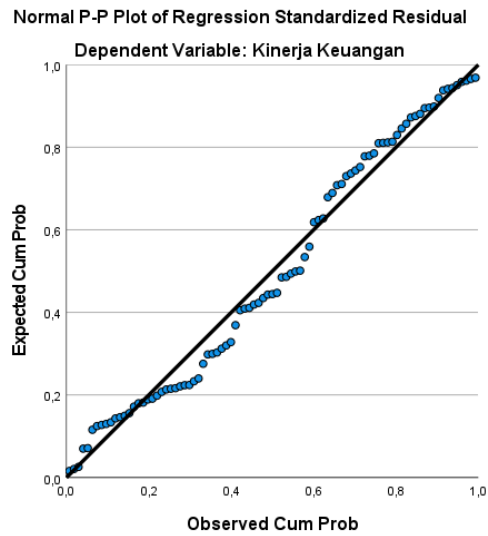
LAMPIRAN 6
Hasil Olah Data SPSS

1. Hasil Uji Analisis Deskriptif

		Statistics			
		Intergovernmental Revenue	Leverage	Ukuran Daerah	Kinerja Keuangan
N	Valid	89	89	89	89
	Missing	0	0	0	0
Mean		,58416	,00872	29,04174	,88137
Median		,58500	,00797	28,98435	,84376
Std. Deviation		,031008	,004364	,264068	,108666
Minimum		,506	,001	28,505	,706
Maximum		,648	,020	29,529	1,103

2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10370332
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,063
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,074
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,076
	99% Confidence Interval	Lower Bound
	Upper Bound	,083
<p>a. Test distribution is Normal.</p> <p>b. Calculated from data.</p> <p>c. Lilliefors Significance Correction.</p> <p>d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.</p>		



3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,797	0,808		0,986	0,327
	Intergovernmental Revenue	0,198	0,203	0,109	0,980	0,330
	Leverage	- 0,388	1,553	-0,030	-0,250	0,803
	Ukuran Daerah	- 0,029	0,026	-0,137	-1,093	0,277

a. Dependent Variable: ABS_RES5

4. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,01476
Cases < Test Value	44
Cases >= Test Value	45
Total Cases	89
Number of Runs	43
Z	-0,532
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,595
a. Median	

5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Intergovernmental Revenue	0,910	1,099
	Leverage	0,777	1,287
	Ukuran Daerah	0,715	1,398
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan			

6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,464	1,553		2,230	0,028
	Intergovernmental Revenue	0,511	0,380	0,146	1,345	0,182
	Leverage	-5,129	2,924	-0,206	-1,754	0,083
	Ukuran Daerah	-0,098	0,050	-0,237	-1,939	0,056
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

7. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,464	1,553		2,230	0,028
	Intergovernmental Revenue	0,511	0,380	0,146	1,345	0,182
	Leverage	-5,129	2,924	-0,206	-1,754	0,083
	Ukuran Daerah	-0,098	0,050	-0,237	-1,939	0,056

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,299 ^a	,089	,057	,105518

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Intergovernmental Revenue, Leverage

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

LAMPIRAN 6

Distribusi Nilai T Tabel

TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI T

df	One-Tailed Test						
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	Two-Tailed Test						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002
81	0,677531	1,292091	1,663884	1,989686	2,373270	2,637897	3,193922
82	0,677493	1,291961	1,663649	1,989319	2,372687	2,637123	3,192619
83	0,677457	1,291835	1,663420	1,988960	2,372119	2,636369	3,191349
84	0,677422	1,291711	1,663197	1,988610	2,371564	2,635632	3,190111
85	0,677387	1,291591	1,662978	1,988268	2,371022	2,634914	3,188902
86	0,677353	1,291473	1,662765	1,987934	2,370493	2,634212	3,187722
87	0,677320	1,291358	1,662557	1,987608	2,369977	2,633527	3,186569
88	0,677288	1,291246	1,662354	1,987290	2,369472	2,632858	3,185444
89	0,677256	1,291136	1,662155	1,986979	2,368979	2,632204	3,184345
90	0,677225	1,291029	1,661961	1,986675	2,368497	2,631565	3,183271
91	0,677195	1,290924	1,661771	1,986377	2,368026	2,630940	3,182221
92	0,677166	1,290821	1,661585	1,986086	2,367566	2,630330	3,181194
93	0,677137	1,290721	1,661404	1,985802	2,367115	2,629732	3,180191
94	0,677109	1,290623	1,661226	1,985523	2,366674	2,629148	3,179209
95	0,677081	1,290527	1,661052	1,985251	2,366243	2,628576	3,178248
96	0,677054	1,290432	1,660881	1,984984	2,365821	2,628016	3,177308
97	0,677027	1,290340	1,660715	1,984723	2,365407	2,627468	3,176387
98	0,677001	1,290250	1,660551	1,984467	2,365002	2,626931	3,175486
99	0,676976	1,290161	1,660391	1,984217	2,364606	2,626405	3,174604
100	0,676951	1,290075	1,660234	1,983972	2,364217	2,625891	3,173739
101	0,676927	1,289990	1,660081	1,983731	2,363837	2,625386	3,172893
102	0,676903	1,289907	1,659930	1,983495	2,363464	2,624891	3,172063
103	0,676879	1,289825	1,659782	1,983264	2,363098	2,624407	3,171250
104	0,676856	1,289745	1,659637	1,983038	2,362739	2,623932	3,170452
105	0,676833	1,289666	1,659495	1,982815	2,362388	2,623465	3,169670
106	0,676811	1,289589	1,659356	1,982597	2,362043	2,623008	3,168904
107	0,676790	1,289514	1,659219	1,982383	2,361704	2,622560	3,168152
108	0,676768	1,289439	1,659085	1,982173	2,361372	2,622120	3,167414
109	0,676747	1,289367	1,658953	1,981967	2,361046	2,621688	3,166690
110	0,676727	1,289295	1,658824	1,981765	2,360726	2,621265	3,165979
111	0,676706	1,289225	1,658697	1,981567	2,360412	2,620849	3,165282
112	0,676687	1,289156	1,658573	1,981372	2,360104	2,620440	3,164597
113	0,676667	1,289088	1,658450	1,981180	2,359801	2,620039	3,163925
114	0,676648	1,289022	1,658330	1,980992	2,359504	2,619645	3,163265
115	0,676629	1,288957	1,658212	1,980808	2,359212	2,619258	3,162616
116	0,676611	1,288892	1,658096	1,980626	2,358924	2,618878	3,161979
117	0,676592	1,288829	1,657982	1,980448	2,358642	2,618504	3,161353
118	0,676575	1,288767	1,657870	1,980272	2,358365	2,618137	3,160738
119	0,676557	1,288706	1,657759	1,980100	2,358093	2,617776	3,160133
120	0,676540	1,288646	1,657651	1,979930	2,357825	2,617421	3,159539

LAMPIRAN 7

Surat Permintaan Data



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
 Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (RSa) Fax. (024) 6582455
 email: fe@unissula.ac.id web: http://fe.unissula.ac.id/

FAKULTAS EKONOMI

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 882/B.I/SA-E/VIII/2024
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Hal. : Ijin Penelitian

Kepada: Yth Kepala BPK RI

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memenuhi tugas akhir, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyusun Skripsi / Tugas Akhir .

Berkenaan dengan keperluan tersebut, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan serta ijin kepada mahasiswa kami yang tertera dibawah ini untuk melakukan penelitian, wawancara, pengambilan gambar, dan mohon data sehubungan dengan penelitian. Data yang kami kumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk penelitian ilmiah saja.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Anisa Farah Pratiwi
 NIM : 31402300131
 Program Studi / Jurusan : Akuntansi
 Alamat : Pedurungan Lor RT 3 RW 5
 No. Telp/HP : 088289160117
 Dosen Pembimbing : Dr. Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Akt

Judul Skripsi
 "Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 2 Agustus 2024
 Dekan Fakultas Ekonomi,

 Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE, M.Si
 NIK. 210493032

